

**DAMPAK PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI
KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKABONERATE KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

*Impact of Fishing Using Explosives in the Takabonerate National Park Area, Selayar
Islands Regency*

Aryva Sulfianti Oktavia*, Yulia A. Hasan, Basri Oner

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: ocktavia95@gmail.com

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara. Hasil penelitian bahwa, dampak yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selalu menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan ikan secara Illegal. Walaupun menurut pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tindak pidana Illegal Fishing memiliki dampak positif seperti penghasilan yang didapatkan lebih besar dari penangkapan ikan biasa namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahkan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan nelayan sebagai pelaku tindak pidana pengeboman ikan kehilangan nyawa mereka.

Kata Kunci: Dampak, Bahan Peledak, Penangkapan Ikan

Abstract

This research is to determine the impact of fishing using explosives in the Takabonerate National Park Area, Selayar Islands Regency. This research uses a qualitative research type using a normative-empirical approach using primary data and secondary data through interviews. The research results show that the impact received by the environment and society in the Takabonerate National Park area caused by fishing using explosives is always a benchmark in making decisions to carry out illegal fishing. Although according to the views of people who work as fishermen, the criminal act of Illegal Fishing has a positive impact, such as the income earned being greater than ordinary fishing, it cannot be denied that there are also negative impacts that can be had by the community and even the environment. One of the negative impacts that is very fatal is that it can cause fishermen as perpetrators of the crime of fish bombing to lose their lives.

Keywords: Impact, Explosives, Fishing



A. PENDAHULUAN

Sumber daya perikanan di laut Indonesia mencapai 37% dari jenis ikan yang ada di dunia. Sebagian besar jenis sumber daya perikanan yang ada mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, lobster, dan berbagai jenis ikan hias. Indonesia juga mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan tersebut belum optimal yaitu rata-rata baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Besarnya potensi lahan yang belum dimanfaatkan menjadi modal dalam menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional (Darajati and Syafei, 2023). Pencurian sumber daya ikan di negara-negara berkembang adalah masalah besar yang perlu ditangani. Penangkapan ikan ilegal merupakan masalah internasional yang melibatkan penjarahan kedaulatan dan kekayaan laut negara (Yulia, Zubaidah, and Ainun 2021). Karena aktivitas manusia dan perubahan lingkungan, sumber daya ikan telah menurun secara global dan regional dalam beberapa tahun terakhir. Pembuangan limbah rumah tangga dan industri ke laut, serta penggunaan berlebihan sumber daya alam oleh manusia, menimbulkan masalah lingkungan hidup (Yulia et al. 2023).

Ikan serta ekosistem di sekitarnya pada dasarnya memang sumber daya alam yang mempunyai daya pulih, walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan dapat dikategorikan sebagai cara penangkapan ikan yang tidak dapat dibenarkan, "Illegal Fishing". Karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan, Indonesia harus memiliki kebijakan maritim untuk melindungi sumber daya lautnya dari tindakan ilegal yang dapat menguras sumber daya tersebut dan menyebabkan kerugian bagi negara. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan menjadi lebih otomatis. Selain tindakan ilegal yang dilakukan kapal asing, pemerintah juga harus menindak tegas nelayan Indonesia yang mengambil hasil laut dengan bahan peledak, yang dapat merusak ekosistem laut dan ekosistem bawah laut. Indonesia telah membuat kebijakan hukum tentang kegiatan nelayan ilegal yang dapat merusak ekosistem laut. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Rahayu, Mangku, and Yuliartini 2019). Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan melalui cara mengadakan koordinasi yang berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sementara menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan: "Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia.” Sedangkan di dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan: “penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia” (Gifari 2023).

Indonesia berpartisipasi dalam berbagai upaya internasional untuk membuat instrumen pengelolaan sumber daya perikanan, seperti UNCLOS 1982 dan UNFSA 1995, antara lain. Perlindungan sumber daya ikan secara internasional sangat terkait dengan upaya ini. Mengingat jumlah ikan yang tersedia di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa eksploitasi dan eksploitasi perikanan di Indonesia meningkat, banyak penangkapan ikan ilegal terjadi di negara tersebut dengan menggunakan berbagai macam alat penangkapan ikan (Yulia et al. 2017). Kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan konvensi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, dimana 2/3 wilayahnya merupakan perairan/laut. Sebagai negara kepulauan terbesar dan terpanjang pantainya ke empat di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah. Namun, kekayaan itu belum dapat dikelola secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan perhatian terhadap kelestarian lingkungan laut belum mendapatkan perhatian serius.

Laut Indonesia mengalami penurunan kualitas akibat maraknya kegiatan yang berdampak negatif terhadap kondisi laut, seperti Illegal Fishing, perusakan terumbu karang dan pencemaran lingkungan. Ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dimasa mendatang, bagaimana kekayaan yang sangat besar tersebut dapat dimanfaatkan bagi sebesar- besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Listiyono and Prakoso 2022). Karena kekayaan laut yang melimpah, nelayan lokal tidak dapat mengaksesnya karena keterbatasan teknologi, daya jangkau kapal yang rendah, dan alat tangkap ikan tradisional.. Selain itu, alasan utama penangkapan ikan ilegal adalah kurangnya penjagaan di perbatasan, yang membuat pelaku merasa nyaman di perairan Indonesia (Hakim et al. 2023). Keberadaan Indonesia sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan membuat negara Indonesia diharuskan memiliki kebijakan-kebijakan maritim guna melindungi sumber daya laut Indonesia dari tindakan ilegal yang menguras sumber daya Indonesia sehingga menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Otomatis masyarakat yang bekerja sebagai nelayan mendapat dampak positif. Tidak hanya kepada tindakan ilegal yang dilakukan kapal asing saja namun pemerintah juga harus menindak tegas kegiatan -kegiatan ilegal nelayan Indonesia yang mengambil hasil laut dengan menggunakan bahan-bahan peledak hingga dapat merusak ekosistem laut dan akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem bawah laut (Putra, Sugiarta, and Suryani 2021). Indonesia sangat kaya akan hasil sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang melimpah adalah hasil dari sumber daya perairan, khususnya perairan laut. Sumber daya perikanan laut Kabupaten Kepulauan Selayar sangat mendukung. Namun, sayangnya, kebanyakan ikan hanya dikonsumsi kebanyakan para keluarga, dan

hanya sedikit masyarakat yang mengolah ikan tersebut menjadi produk makanan lain seperti abon, sosis ikan atau produk olahan lain berbahan dasar ikan laut yang seharusnya berdaya jual tinggi.

Dengan banyaknya peminat-konsumen yang membutuhkan banyaknya persediaan ikan, sementara itu tidak didukung dengan jumlah tangkapan nelayan, menyebabkan banyaknya kasus pengeboman ikan di wilayah Selayar, khususnya daerah Kawasan Taman Nasional Takabonerate dan sekitarnya. Pengeboman ikan ini ditujukan untuk mendapatkan jumlah tangkapan ikan laut yang lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Pada satu sisi, kesejahteraan nelayan akan meningkat, namun ada banyak dampak negatif akibat dari pengeboman ikan, seperti ikan-ikan kecil juga ikut mati, terumbu karang juga menjadi mati dan berkurang, yang dampak ke depannya jumlah ikan akan berkurang karena tempat atau rumah mereka berlindung, yaitu terumbu karang menjadi punah (Puspitasari 2019). Aktivitas penangkapan ikan di Indonesia telah mendekati kondisi kritis, akibat tekanan penangkapan dan tingginya kompetisi antar alat tangkap dan telah menyebabkan menipisnya stok sumberdaya ikan. Sehingga nelayan mulai melakukan modifikasi alat tangkap untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal termasuk menggunakan teknologi penangkapan yang merusak atau tidak ramah lingkungan. (Latuconsina 2010)

Para nelayan yang ada di Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar masih sering melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal ini sangat berbahaya bagi diri pelaku juga terhadap lingkungan dan habitat laut serta ekosistem yang ada disekitarnya, bahkan dapat musnah. Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pembaruan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, telah memberikan kepastian, hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindak pidana dibidang perikanan. Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum. Walaupun penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah suatu perbuatan terlarang yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya di wilayah perairan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, masih sering terjadi penangkapan ikan secara illegal dengan cara menggunakan bahan peledak oleh para nelayan (Jasrudin 2016).

Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. METODE PENELITIAN

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitian yakni di Kawasan Taman Nasional Takabonerate, Kepolisiaan Perairan dan Udara (POLAIRUD) serta Balai Taman Nasional Takabonerate yang beradada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemilihan lokasi ini telah penulis pertimbangkan secara objektif untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas. Adapun cara untuk mengumpulkan data yaitu dengan teknik: 1) Teknik Penelitian Lapangan (Field Research) Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi ke pihak terkait seperti masyarakat yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Takabonerate, Sekretaris Desa Tarupa, Kepala SPTN Wilayah 1 Tarupa sebagai perwakilan pihak dari Balai Taman Nasional Takabonerate, dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD). 2) Teknik Penelitian Pustaka (Library Research) Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi secara mendalam melalui berbagai literatur, majalah, jurnal, buku, dan berbagai referensi lainnya. Serta melihat penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan landasan teori maupun jawaban dari masalah yang akan diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Terjadinya Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate

Kawasan Taman Nasional Takabonerate merupakan taman laut yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar dan memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshal dan Suvadiva di Kepulauan Maldives. Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektar dengan terumbu karang yang tersebar datar seluas 500 kilometer persegi. Memiliki beragam biota laut membuat Kawasan Taman Nasional Takabonerate banyak diincar oleh oknum nelayan yang ingin menangkap biota laut di kawasan tersebut secara *Illegal*.

Menurut Suharjo Muna Sekretaris Desa Tarupa, ada beberapa faktor yang mendorong oknum nelayan untuk melakukan penangkapan ikan secara *Illegal* di Kawasan Taman Nasional Takabonerate :

1) Faktor Ekonomi

Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan bahan peledak ini tidak terlepas dari faktor utama yaitu perihal perekonomian. Perekonomian yang rendah di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Khususnya di Pulau Tarupa seringkali memicu terjadinya *Illegal Fishing* di Kawasan ini. Hasil yang memuaskan dan usaha yang instan membuat para nelayan akhirnya

mengambil cara dengan menggunakan bahan peledak agar hasil tangkapannya bisa digunakan untuk menutupi utang dan bertahan hidup.

2) Faktor Regenerasi (Turun Temurun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tarupa menjelaskan bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ini sudah dilakukan sejak lama. Hal ini membuat beberapa oknum nelayan menjadikan hal tersebut sebagai budaya yang harus di turunkan ke anak cucu mereka. Banyak nelayan yang sudah mengajak anak mereka yang dibawah umur untuk ikut menangkap ikan secara *Illegal* hingga meracik bahan peledak yang akan digunakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran diri masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dari dampak negatif yang akan di terima dari tindakan *Illegal Fishing*. Selain itu, hal ini terjadi dikarenakan penegakan hukum dari aparat kepolisian yang kurang tegas.

3) Faktor SDM

Sumber Daya Manusia seringkali pemicu terjadinya *illegal fishing* karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga sumber daya laut serta regulasi yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan.

Tabel 1. Data Kasus Illegal Fishing di Kawasan Taman Nasional Takabonerate

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku
1	2022	6 (Enam) Kasus	7 (Tujuh) Pelaku
2	2023	6 (Enam) Kasus	15 (Lima Belas) Pelaku

Sumber: Balai Taman Nasional Takabonerate Tahun 2024

a. Dampak Negatif Terhadap Lingkungan

Penangkapan ikan mnegggunakan bahan peledak tentunya akan memicu dampak negatif bagi lingkungan perairan bahkan pesisir. Dari hasil wawancara bersama Kepala SPTN Wilayah 1 Tarupa mengenai dampak negatif yang akan didapat oleh lingkungan di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh *Illegal Fishing* antara lain:

1) Kerusakan Terumbu Karang

Ledakan dari bahan peledak dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Ini mengganggu habitat ikan dan organisme laut lainnya. Sebagai contoh kasus di tahun 2010 yang terjadi di Pulau Jinato pengeboman ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga mengakibatkan kerusakan terumbu karang di sekitar Pulau Jinato.

2) Pemusnahan Habitat

Ledakan bisa merusak struktur dasar laut seperti batuan dan pasir, mengakibatkan perubahan besar pada habitat ikan dan makhluk laut lainnya.

3) Penangkapan Tidak Selektif

Penggunaan bahan peledak tidak selektif dan sering kali menghasilkan penangkapan tidak diinginkan, termasuk spesies yang dilindungi atau yang tidak diinginkan.

4) Kehilangan Sumber Daya

Praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak cenderung merusak lingkungan dan mengurangi sumber daya ikan di Kawasan Taman Nasional Takabonerate. Contoh kasus yang terjadi dalam populasi jenis ikan yang hampir punah yaitu jenis ikan kerapu.

5) Pencemaran Lingkungan

Penggunaan bahan peledak dapat menyebabkan pencemaran air dan udara dengan limbah kimia dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

6) Dampak Terhadap Ekosistem Laut

Praktik ini dapat mengubah struktur dan fungsi ekosistem laut, mengancam keseimbangan ekologi dan keberlanjutan sumber daya laut.

b. Dampak Negatif Terhadap Masyarakat

Bukan hanya berdampak bagi lingkungan, namun kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini juga berdampak negatif bagi masyarakat baik yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing* itu sendiri maupun yang berada disekitar lokasi terjadinya *Illegal fishing*. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa dan salah satu Tokoh Masyarakat berikut adalah beberapa dampak negatif didapatkan oleh masyarakat yang disebabkan oleh penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate :

1) Bisa berdampak bagi kesehatan keselamatan nyawa nelayan

Tidak menutup kemungkinan melakukan kegiatan *Illegal Fishing* membuat para pelaku kehilangan nyawa (meninggal dunia). Hal ini dikarenakan penggunaan bahan peledak yang menyebabkan ledakan yang tidak terkontrol di atas permukaan air maupun di dalam air. Sebagai contoh kasus berdasarkan hasil observasi dan data yang telah peneliti dapatkan, pelaku melakukan pengeboman ikan di perairan Takabonerate pada September 2023. Saat akan melempar bom, bom yang berada di tangan pelaku meledak dan menewaskan pelaku.

2) Bisa berdampak bagi perputaran perekonomian nelayan

Ledakan dari bahan peledak yang digunakan tentunya dapat merusak peralatan penangkapan ikan dan bahkan kapal nelayan. Kerusakan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk perbaikan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan modal para nelayan. Selain itu, meskipun penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bisa menghasilkan tangkapan yang besar dalam waktu singkat, tetapi kegiatan *Illegal Fishing* dapat merusak habitat ikan yang dapat mengakibatkan penurunan stok ikan disekitar lokasi *illegal fishing*. Seiring berkurangnya stok

ikan, hasil tangkapan nelayan secara keseluruhan akan menurun dan pastinya mengurangi pendapatan nelayan.

3) Bisa berdampak bagi kesehatan nelayan

Penangkapan ikan secara *illegal* juga berdampak bagi kesehatan nelayan itu sendiri. Di Kawasan Taman Nasional Takabonerate sudah banyak nelayan yang mengalami dekompresi yang disebabkan karena nelayan yang melakukan penyelaman dalam waktu yang lama dan pada kedalaman yang signifikan dapat terpapar tekanan udara yang tinggi dibawah permukaan laut. Selain itu, banyak nelayan yang menggunakan kompressor sebagai alat bantu pernapasan selama menyelam. Sedangkan, penggunaan kompressor untuk menyelam bisa menyebabkan dekompresi jika nelayan tidak memperhatikan waktu dan kedalaman penyelaman yang tepat. Penggunaan alat kompressor juga dapat membuat kerusakan telinga karena suara keras dari kompressor dapat merusak pendengaran nelayan.

Contoh kasus dampak dari penggunaan kompressor ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama berada di Pulau lokasi penelitian ada 1 (satu) masyarakat yang terkena dampak tersebut, masyarakat tersebut tidak bisa lagi berjalan normal dikarenakan pernah mengalami dekompresi dan ditangani dengan pengobatan lokal dari masyarakat setempat. Sekarang masyarakat tersebut sudah tidak berprofesi sebagai nelayan lagi.

2. Dampak Positif Bagi Masyarakat yang Disebabkan oleh Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak

Beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kawasan Taman Nasional Takabonerate menganggap kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak memiliki dampak positif bagi mereka. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa menjelaskan bahwa Hasil dari penangkapan ikan secara *Illegal* bisa dijadikan modal untuk berangkat haji. Walaupun tidak semua masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang bisa berangkat haji menggunakan hasil dari penangkapan ikan secara *illegal*, namun ada beberapa masyarakat yang menggunakan cara tersebut untuk bisa berangkat haji. Karena menurut masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate (Desa Tarupa) bahwa gelar haji adalah status sosial yang tinggi. Hasil dari penangkapan ikan secara *illegal* juga digunakan untuk menyekolahkan anak mereka diluar Pulau yang berada di Kawasan. Kemudian hasil dari penangkapan ikan secara *Illegal* digunakan beberapa nelayan untuk merenovasi rumah mereka.

Ini disebabkan karena hasil dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak jauh lebih besar daripada hasil dari penangkapan ikan biasa (*legal*). Hal tersebut membuat masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memilih melakukan penangkapan ikan secara *Illegal*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan dan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh penangkapan ikan menggunakan bahan peledak selalu menjadi tolak ukur masyarakat khususnya nelayan yang tinggal di kawasan dalam mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Walaupun menurut pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tindak pidana *Illegal Fishing* memiliki dampak positif seperti penghasilan yang didapatkan lebih besar dari penangkapan biasa namun, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahkan lingkungan seperti kehilangan nyawa pelaku nelayan, terganggunya kesehatan nelayan, berkurangnya populasi ikan akibat pengrusakan habitat hingga kepada penangkapan ikan yang tidak selektif

DAFTAR PUSTAKA

- Darajati, Muhammad Rafi, and Muhammad Syafei. 2023. "Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30(1):138–58. doi: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art7.
- Gifari, Muhammad Adha. 2023. "Penegakan Hukum Tindak Pidanan Ilegal Fishing Di Wilayah Hukum Polda Banten Dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3(1):579–85. doi: 10.29313/bcsls.v3i1.5059.
- Hakim, Abdurrahman, Fakultas Syariah, Hukum Uin, Sayyid Ali, Rahmatullah Tulungagung, Jl Mayor, Sujadi Timur, Kabupaten Tulungagung, M. Darin Arif, Fakultas Syariah, Hukum Uin, Sayyid Ali, Rahmatullah Tulungagung, Jl Mayor, Sujadi Timur, and Kabupaten Tulungagung. 2023. "Tanggung Jawab Negara Dalam Menangani Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Indonesia." *Rechtsvinding* 12:503–23.
- Jasrudin, jasmin daud. 2016. "Perilaku Menyimpang Ilegal Fishing Risnawati." *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV(1):1–10.
- Latuconsina, Husain. 2010. "Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan Di Kawasan Konservasi Laut Pulau Pombo Provinsi Maluku." *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan* 3(2):23–30. doi: 10.29239/j.agrikan.3.2.23-30.
- Listiyono, Yudi, and Lukman Yudho Prakoso. 2022. "Laut Dan Deterrence Effect Indonesia Building Indonesian Sea Building Indonesian Sea Power Based On The Indonesian Sea Guard." (February).
- Puspitasari, Dyah Retno. 2019. "Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Perairan Halmahera Utara." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 3(2):94. doi: 10.26740/jpsi.v3n2.p94-98.
- Putra, I. Nyoman Rama Cahyadi, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(3):2.
- Rahayu, Kadek Intan, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 2(1):145–55.
- Yulia, Yulia, Baso Madiung, Mustawa Mustawa, Ruslan Renggong, and Zulkifli Zulkifli. 2023. "Siri'na Pacce: A Form of Fulfilling Women's Rights through the Conduct of Responsible Fisheries." *Jambura Law Review* 5(1):76–97. doi: 10.33756/jlr.v5i1.17024.
- Yulia, Yulia, Farida Patittingi, Alma Manuputty, and Marcel Hendrapati. 2017. "Law Enforcement on Conservation of Fish Resources in Indonesia." *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 22(01):64–69. doi: 10.9790/0837-2201046469.
- Yulia, Siti Zubaidah, and Hastrie Ainun. 2021. "Illegal Fishing by Foreign Vessels against Fish Resources in Sulawesi Sea Waters, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 860(1). doi: 10.1088/1755-1315/860/1/012095.